

57 TAHUN POLDA

KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang biasa disingkat Polda Metro Jaya, memasuki usianya yang ke-57 tahun. Sebuah usia yang kalau dianalogikan dengan umur manusia, bisa disebut sangat matang. Tetapi sebagai sebuah instansi, tentu analoginya bukan berarti Polda Metro Jaya berada dalam usia pensiun, uzur, pikun, atau yang seperti kebanyakan manusia alami.

PADA usia seperti sekarang ini, Polda Metro Jaya sudah sepantasnya jika menjadi sebuah instansi yang matang dalam arti sesungguhnya, karena pengalaman dan perjalanan panjangnya dalam berperan sesuai tugas dan fungsi keberadaannya. Lebih dari itu, karena Polda Metro Jaya membawahi sebuah wilayah ibukota dengan kompleksitas permasalahannya sebagai kota metropolitan dan ibukota negara, maka dengan sendirinya Polda Metro Jaya harus menjadi barometer bagi parameter instansi kepolisian Republik Indonesia.

Sudahkah kematangan Polda Metro Jaya juga tercermin pada kerja jajarannya yang mengusung semboyan melayani dan mengayomi masyarakat? Yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah warga masyarakat, baik yang berdomisili di wilayah Jakarta Raya maupun mereka yang pernah punya urusan dengan Jakarta Raya. Pertanyaan klasik yang sering muncul adalah, sudahkan kepolisian kita, khususnya di jajaran Polda Metro Jaya, sudah bisa disebut profesional

dalam membawakan fungsi dan perannya?

Memang tidak bisa jawaban atas pertanyaan semacam itu menjadi hitam putih. Akan banyak penjelasan-penjelasan, kenapa Polda Metro Jaya dianggap sudah profesional maupun belum profesional. Kedua jawaban itu juga harus dilengkapi dengan latarbelakang kompleksitas yang dihadapi Polda Metro Jaya sebagai sebuah instansi kepolisian di pusat pemerintahan nasional, serta kompleksitas dari permasalahan wilayah Jakarta Raya sendiri, yang sudah pasti bersifat khusus dan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kita tidak menutup mata bahwa upaya-upaya peningkatan profesionalisme di dalam instansi Polda Metro Jaya, terus-menerus dibangun dan ditingkatkan. Baik yang sifatnya dukungan sarana, fasilitas, atau barangkali juga manajemen organisasinya. Rasanya tidak berlebihan jika Polda Metro Jaya terus berusaha berusaha memperlihatkan sosoknya sebagai instansi kepolisian yang sejajar dengan instansi-instansi kepolisian di wilayah-wilayah metropolitan dan ibukota negara besar dan maju. Namun soal keberhasilan, memang sesuatu yang lain lagi. Apalagi jika keberhasilan penilaiannya diserahkan kepada obyektivitas umum.

Pesatnya kemajuan zaman, yang ditandai dengan cepatnya perkembangan teknologi-informasi, dinamika budaya, serta kecenderungan globalisasi, yang melahirkan permasalahan-permasalahan baru di bidang pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum, Polda Metro Jaya dituntut terus-menerus menjawabnya dengan kemampuan yang dimiliki. Begitu pun tingkat tingginya dinamika sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan lain sebagai-

nya, membawa konsekuensi bagi Polda Metro Jaya untuk tidak berhenti sejenak pun dalam melakukan pembangunan dan pengembangan instansinya sebagai sebuah inovasi pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum.

Dalam hal manajemen kerja jajarannya, Polda Metro Jaya dituntut mampu menjawab masalah-masalah baru yang dihadapi. Dan



METRO JAYA

masalah-masalah baru itu akan terus bermunculan dengan segala perniknya. Seperti kita tahu, dalam kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, dinamika sosial politik yang intensitasnya tinggi, serta kecenderungan globalisasi di mana sebuah wilayah menjadi sangat terbuka, maka di sana sangat mungkin bermunculan hal-hal baru dalam masalah-masalah hu-

kum, pelayanan, serta pengayoman, dalam masyarakat, yang menjadi tanggungjawab polisi. Di sisi lain kemajuan-kemajuan, dinamika, dan kecenderungan global seperti itu, juga melahirkan jenis-jenis baru pelanggaran hukum, kepiawaian-kepiawaian modus operandi kejahatan, serta keterkaitan-keterkaitan berbagai perkara antara yang satu dengan lainnya, antara

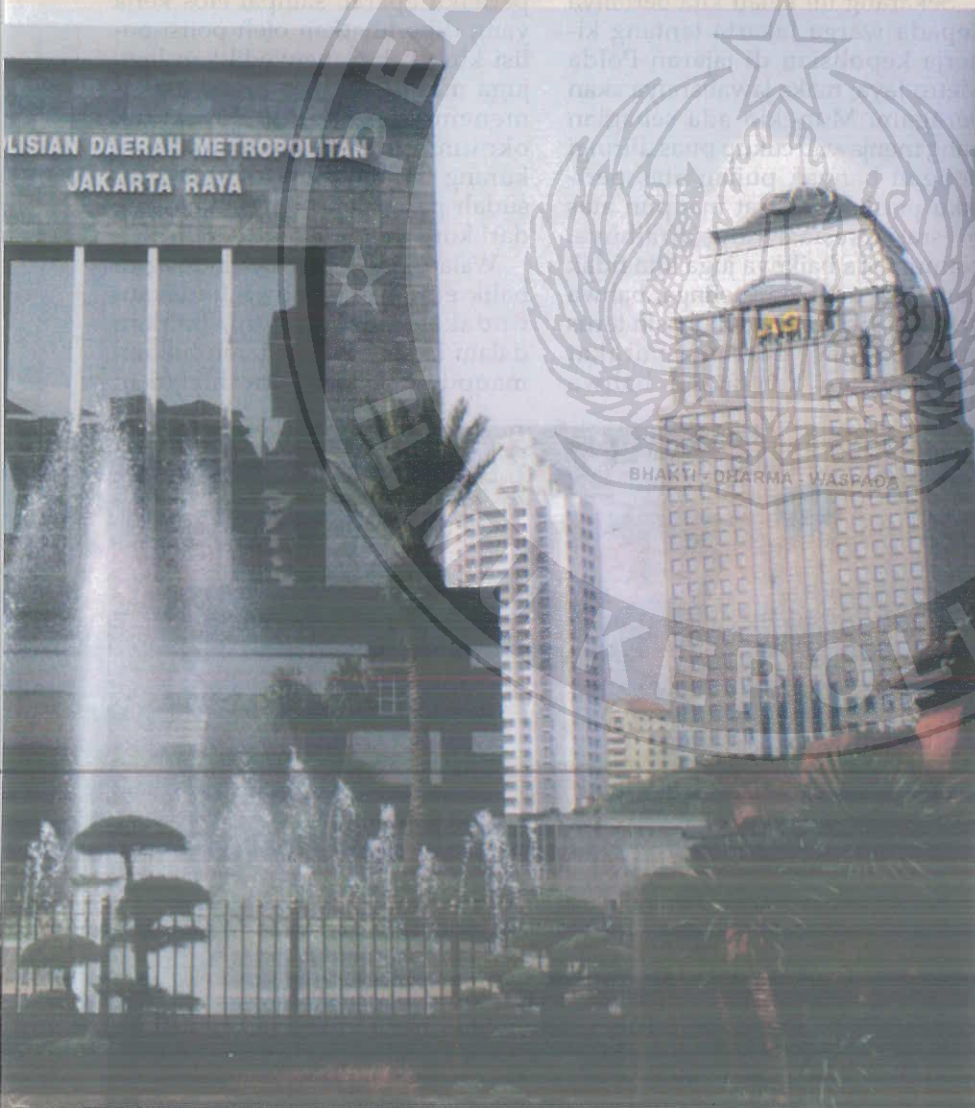
yang berlangsung di wilayah Jakarta Raya dengan di berbagai belahan dunia lainnya.

Untuk menanganinya dengan sendirinya juga membutuhkan piranti-piranti yang semakin canggih, baik secara teknis maupun non-teknis.

Tidak berlebihan jika Polda Metro Jaya dituntut secara terus-menerus melakukan kajian, telaah, antisipasi, pengembangan-pengembangan. Baik dalam hal teknis maupun non teknis. Baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusianya. Baik dari segi perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan maupun sistem pengoperasiannya. Baik dari segi manajemen sebagai organisasi kepolisian maupun dalam mengimplementasikan visi dan misi dari kepolisian itu sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan, betapa lucu jika misalnya suatu saat di masyarakat terjadi sebuah perkara yang berkaitan dengan teknologi cyber-internet berjangkauan internasional, tiba-tiba Polda Metro Jaya tidak paham untuk menanganinya atau tidak memiliki piranti yang dibutuhkan. Juga tidak lucu, jika misalnya di masyarakat Jakarta muncul sebuah kasus hukum yang jangkauannya berkaitan dengan keberadaan satelit ruang angkasa yang dioperasikan negara lain, tiba-tiba Polda Metro Jaya gagap dalam ikut berperan menangani kasus itu.

Misal-misal yang lain akan masih banyak, baik perkara-perkara kecil maupun besar, yang sangat mungkin suatu hari, di luar dugaan kita, muncul di Jakarta Raya ini. Pun kalau dalam kasus-kasus tertentu, karena satu dan lain hal, kompleksitas permasalahan di Jakarta Raya ada yang kemudian menjadi tanggung jawab Markas



Besar Kepolisian RI atau International Police sekali pun, tetaplah tidak lucu jika instansi kepolisian seperti Polda Metro Jaya terkesan kurang memiliki kapasitas untuk ikut berperan di dalamnya. Di sinilah sebenarnya, Polda Metro Jaya menghadapi tantangan yang cukup berat.

Dalam kematangan di usianya yang sekarang, Polda Metro Jaya semakin berat menghadapi tantangan, karena juga di masa reformasi ini, kepolisian Republik Indonesia dituntut kemandiriannya. Setelah terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) paska gerakan reformasi dan seiring dinamika perubahan sosial-politik di negeri ini, kepolisian Republik Indonesia menghadapi tantangan berat, sekaligus tanggungjawab dan amanat yang jauh lebih menantang. Pada masa-masa itu, Polda Metro Jaya akan menjadi garda terdepan untuk dijadikan cerminan atau barometer, apakah benar telah berlangsung reformasi dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Apakah benar kepolisian Republik Indonesia sudah memiliki kemandirian. Apakah benar berlangsung paradigma baru dalam implementasi visi dan misi kepolisian Republik Indonesia. Dunia mengukurnya dari apa yang terjadi dan berlangsung dalam Polda Metro Jaya.

Perlu dipahami bahwa keberhasilan dalam arti kita bisa menilai Polda Metro Jaya telah ideal, adalah merupakan hal yang sulit. Karena kalau kita bicara sebuah instansi kepolisian yang ideal untuk wilayah seperti Jakarta Raya ini, dengan jumlah manusia di dalamnya yang mencapai puluhan juta, ditambah kompleksitas permasalahannya tadi, maka melihat jumlah polisi yang bernaung di bawah Polda Metro Jaya kiranya belum bisa dikatakan ideal. Perbandingan jumlah penduduk dan jumlah polisi masih belum memadai. Juga perbandingan antara tingkat mobilitas yang tinggi penghuninya dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki Polda Metro Jaya. Begitu pula

perbandingan antara tingkat kecanggihan daya hidup masyarakat dengan tingkat kecanggihan piranti yang dimiliki Polda Metro Jaya.

Justru karena standar ideal itu sulit kita peroleh, mengingat negara kita memang belum termasuk negara maju, melainkan baru negara berkembang, maka di sinilah Polda Metro Jaya ditantang untuk bisa mewujudkan fungsi dan perannya secara maksimal. Dengan kata lain, masyarakat Jakarta Raya benar-benar merasakan dan mendapatkan hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Polda Metro Jaya, baik dalam hal pelayanan, pengayoman, penegakan hukum, perilaku aparat-aparat, dan lain sebagainya.

Sekarang ini kalau kita bertanya kepada warga Jakarta tentang kinerja kepolisian di jajaran Polda Metro Jaya, maka jawabannya akan beragam. Mungkin ada sebagian yang menjawab cukup puas diiringi dengan banyak pujian atas perilaku-perilaku aparat maupun atas prestasi-prestasi yang diraihinya. Namun ada baiknya juga kita tidak menutup mata dan telinga, bahwa kritik-kritik yang tajam masih terus bermunculan dari masyarakat berdasarkan kenyataan bahwa

kinerja kepolisian di jajaran Polda Metro Jaya di mata mereka masih sangat amatiran. Kita tidak boleh mengabaikan hal itu. Apalagi dalam kenyataan memang masih ditemukan praktek-praktek, tindakan-tindakan, atau pun perilaku dari aparat-aparat, yang belum sesuai dengan prinsip melayani, mengayomi, melakukan penegakan hukum.

Dalam sorotan masyarakat masih sering kita dengar opini-opini yang bernada kurang puas terhadap kinerja kepolisian, termasuk dalam jajaran Polda Metro Jaya. Opini-opini ini tertuju pada semua bagian di organisasi kepolisian, apakah yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum, etika dan perilaku aparat, sampai etos kerja yang diperlihatkan oleh polisi-polisi kita. Lebih menyedihkan lagi, juga masih seringnya masyarakat menemukan praktek-praktek oknum polisi yang dinilainya kurang terpuji, di mana semua itu sudah pasti mencoreng nama baik dari korp kepolisian itu sendiri.

Walau kita sering berlindung di balik eufimisme bahwa tindakan-tindakan tidak terpuji, bahkan dalam bentuk pelanggaran hukum maupun kejahatan, itu dilakukan



oleh oknum, namun masyarakat tetap menilai bahwa semuanya itu adalah bagian dari cermin kinerja kepolisian. Maka semangat yang harus dibangun jika menginginkan citra polisi di mata masyarakat sudah membaik, tidak lain dan tidak bukan adalah meminimalisasi atau malah meniadakan sama sekali praktek-praktek tidak terpuji, pelanggaran hukum, atau tindak kejahatan, yang dilakukan oknum polisi dengan membawa atribut kepolisiannya.

Kehidupan keseharian di Jakarta Raya senantiasa melibatkan polisi, terutama adalah jajaran Polda Metro Jaya. Yang paling mudah dilihat adalah hadirnya aparat-aparat polisi di jalanan mengatur lalu-lintas. Masyarakat jelas sangat membutuhkan kehadiran polisi-polisi itu. Lalu lintas di Jakarta tanpa kehadiran polisi secara fisik di jalanan, rasanya akan semakin membuat Jakarta Raya ini semrawut serta menyulut tingkat ketegangan yang tinggi antarwarga, selanjutnya bisa membiarkan kriminalitas jalanan tumbuh dengan leluasa. Kita melihat polisi-polisi anggota Polda Metro Jaya punya pekerjaan yang ekstra lebih berat dan melelahkan dalam mengatur lalu-lintas, dibanding polisi-polisi dari Polda lain. Dalam hal ini, sebagian masyarakat sangat menghargai dan memahami kerja keras para polisi itu.

Namun juga masyarakat tetap tidak bisa mentolerir, tentang masih banyaknya praktek-praktek tidak terpuji masalah lalu-lintas ini. Salam tempel, penyelesaian 'tilang' damai, atau malah praktek polisi yang sengaja 'menjaring' kesalahan pengguna lalu-lintas untuk mendapatkan uang, bukanlah sesuatu yang asing dan sulit kita temukan di wilayah Jakarta Raya ini. Semua itu merupakan bagian dari potret kinerja kepolisian yang melahirkan opini negatif di masyarakat.

Contoh tentang polisi lalu-lintas hanyalah salah satu saja dari banyak ilustrasi di semua bagian dalam kepolisian. Di bidang-bidang seperti hukum dan kriminal, sosial



dan budaya, politik dan keamanan, serta lain-lainnya, masih sering masyarakat menemukan praktek-praktek atau tindakan oknum kepolisian yang belum mencerminkan paradigma baru kepolisian. Opini-opini negatif adalah bentuk kritik yang harus menjadi perhatian jajaran Polda Metro Jaya di ulang tahunnya yang sekarang ini.

Secara obyektif, tetap kita akui, bahwa dibanding empat atau lima tahun lalu, citra kepolisian, termasuk Polda Metro Jaya, jauh semakin membaik di semua bidang. Pelayanan seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi atau Surat Tanda Nomor Kendaraan, yang lima tahun lalu masih bertele-tele dan fasilitasnya dipenuhi, kini relatif cepat dan tidak melibatkan direcoki oleh kehadiran calo-calo. Warga juga semakin berani untuk datang ke polisi melaporkan hal-hal yang dirasakan perlu ditindaklanjuti oleh aparat maupun secara hukum. Ini membuktikan di bidang pelayanan masyarakat, kinerja polisi jauh lebih terkesan akrab dan bersahabat. Tahanan-tahanan di jajaran Polda Metro Jaya juga tidak seseram lima atau sepuluh tahun, di mana orang membayangkan kemungkinan perlakuan yang tidak manusiawi.

Era reformasi mendorong proses kepolisian Republik Indonesia menuju ke arah kemandirian dan

profesionalisme dengan paradigma barunya. Polda Metro Jaya sejauh ini telah membuktikan mampu mengimplementasikan amanat atau visi dan misi Kepolisian RI yang seperti itu. Secara umum masyarakat melihat citra polisi yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Adanya opini negatif dari sebagian warga, adalah bentuk kritik-kritik membangun yang diharapkan demi perbaikan kinerja kepolisian di jajaran Polda Metro Jaya.

Kita paham bahwa Jakarta Raya memiliki kompleksitas permasalahan yang luar biasa, dan jajaran polisi hanyalah salah satu unsur saja dari aparat negara untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum, kepada masyarakat. Juga bagi Polda Metro Jaya yang berperan dan berfungsi memberikan pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum, di wilayah Jakarta Raya. Namun di dalam kompleksitas permasalahan dan tantangan Polda Metro Jaya yang cukup berat, masyarakat tetap berharap kinerja dan citra polisi tampil dengan yang terbaik.

Karena citra polisi itulah yang akan memandu masyarakat dalam membangun kedisiplinan, kepatuhan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keserasian sosial, dan seterusnya. Dirgahayu Polda Metro Jaya. [rus/bud]